

# Muslim Kelas Menengah dan Proses Demokratisasi di Indonesia

Asep Saepudin Jahar

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Sekolah Pascasarjana

UIN Jakarta

asepjahar@yahoo.com

## Abstract

This article discusses the role of Muslim middle class in making democratization in Indonesia. The democratization in Indonesia has much indebted to the young Muslims' contribution. This is started their efforts to enhance the sectors of economy, social and education. Both social and educational sectors had become two main strategies to cultivate the democratization process. Suprisingly, the process of democratization had not happened within political parties, but in places such as campuses and Islamic religious circles.

**Kata kunci:** demokrasi, modernis, kelas menengah, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama.

## Pendahuluan

Kemunculan kelas menengah di Indonesia menjadi embrio munculnya kekuatan masyarakat dalam menyeimbangi dominasi penguasa. Dipengaruhi oleh kesadaran identitas kewarganegaraan dan keagamaan, Muslim kelas menengah Indonesia muncul sejak masa penjajahan dan menguat lambat laun hingga masa Orde Baru dengan berbagai gerakannya. Pada masa penjajahan gerakan kelas menengah lebih didorong sebagai respon terhadap hegemoni pemerintahan kolonial Belanda yang masih melihat pribumi sebagai warga kelas bawah. Dibanding warga negara lain yang hadir bersama Kolonial, Cina dan Arab, misalnya, menjadi kelompok masyarakat yang jauh lebih mendapat pengakuan dari pada warga pribumi terutama dalam hak-hak personal, pidana dan urusan-urusan keagamaan. Pada masa kemerdekaan terutama pada masa Orde Baru, Muslim kelas menengah lebih menempati basis-basis dakwah, sosial dan pendidikan. Gerakan-gerakan yang dilakukan dengan cara ini karena adanya tekanan pemerintah yang khawatir muncul Islam sebagai ideologi baru yang menyaingi Pancasila. Namun baru pada masa akhir pemerintahan Soeharto, karena mulai melemahnya kekuatan dukungan dari ABRI dan beberapa sayapnya, pilihan kepada kelompok Islam mulai dilakukan. Pada akhir

tahun 1990-an lah Muslim kelas menengah mulai masuk ke dunia birokrasi dan politik.

Untuk menjelaskan bagaimana terjadi transformasi kelas menengah pasca kemerdekaan, gerakan Islam kultural menjadi ciri khas menguatnya Muslim kelas menengah di Indonesia. Diawali dengan dakwah terutama oleh kelompok modernis, utamanya dimotori oleh M. Natsir dengan Dewan Dakwah-nya, kampus menjadi tempat penyemaian kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki imajinasi tentang keislaman dan keindonesiaan. Semangat keislaman ini, walaupun lebih bersifat literalis, memfokuskan semangat “sosialisme,” “keislaman” sebagai kajian-kajian *halaqah* mahasiswa. Salman di ITB dan gerakan kampus IPB adalah contoh kecil hasil dari semaian gerakan Islam kelas menengah. Dari kelompok inilah kemudian pasca Orde Baru yang melahirkan Partai Keadilan Sejahtera, yang umumnya didukung oleh para alumni kampus.

Dari sisi bisnis, kemunculan pengusaha Muslim Indonesia juga sebagai kesadaran atas rendahnya tingkat partisipasi Muslim dalam dunia usaha. Probosutejo tampil sebagai salah satu pengusaha yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan keislaman dan mendukung pendirian-pendirian yayasan sosial dan keagamaan.

Peran tokoh semacam Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sangat mewarnai kebangkitan kaum muda utamanya dari kelompok modernis dan tradisional. Cak Nur, julukan Nurcholish Madjid, berhasil mewacanakan pentingnya Islam keindonesiaan yang memperhatikan perubahan lebih dinamis. Keislaman harus dimaknai sebagai kesadaran sosial bukan sebatas ritual. Karena itu, Cak Nur sangat konsen dengan kemajemukan dan kemodernan bagi masyarakat Muslim yang sangat lama terbelenggu oleh fanatisme mazhab dan etnis. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) juga tokoh yang mampu menarik Nahdhatul Ulama ke dunia kota untuk terlibat dan bersimbiosis dengan kehidupan sosial dan politik. Gus Dur membangkitkan ulama sebagai agen perubahan sosial tidak lagi hanya dijadikan sebagai objek kepentingan. Dari sinilah interkoneksi Muslim kelas menengah menguat dalam kerangka negara demokrasi.

### **Kelas Menengah di Indonesia**

Perbincangan “kelas menengah Indonesia” sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an, tetapi sebagai sebuah *discourse* istilah ini baru mendapat perhatian besar dari masyarakat dan kalangan akademis sejak dasawarsa 1980-an, periode yang oleh Ariel Heryanto disebut periode “sadar diri” kelas menengah Indonesia.<sup>1</sup> Tapi hampir dalam kurun dua dekade itu, setiap

---

<sup>1</sup>Ariel Heryanto, “Kelas Menengah Indonesia: Tinjauan Kepustakaan,” *Prisma*, No. 4 (1990).

perbincangan, seminar, diskusi maupun tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media,<sup>2</sup> diskursus kelas menengah hampir absen dari perumusan konseptual dan teoritik yang dapat dijadikan unggulan konsep dan teori terbaik. Absennya *item* ini dikarenakan perhatian yang terlalu besar pada ranah empirik dan/atau pencanderaan indikator-indikator kelas menengah secara parsial. Empat hal yang menonjol adalah: pertama, kelas menengah Indonesia biasanya diperbincangkan sebagai sesuatu yang otonom. Secara implisit ia dianggap berbeda dari kelas lain, tidak bergantung pada keterkaitan dengan kelas-kelas lain. Indikator seperti gaji, profesi, gaya hidup, tingkat pendidikan, dan pola konsumsi biasanya dijadikan ciri baku atau jati diri seseorang/ kelompok menjadi/dianggap kelas menengah, tanpa mempertanyakan dimana batas kelas menengah dengan kelas atas dan bawah. Selain itu, tidak pernah jelas bagaimana hubungan antara satu kelas dengan kelas lain. Laporan Kompas tahun 1986, 1996, dan 1997<sup>3</sup> dapat menjadi contoh belum beranjaknya konsep kelas menengah dari indikator-indikator profesi, gaji, gaya hidup, tingkat pendidikan, dan pola konsumsi.

Kedua, kelas menengah sering diidentikkan dengan kaum pengusaha (borjuasi). Sesekali ada golongan lain yang juga dimasukkan dalam kelas ini (yakni mereka yang selera hidup dan gajinya sebanding dengan pengusaha): kaum profesional swasta (pengacara, jurnalis, dokter, dosen), birokrat atau manajer perusahaan.<sup>4</sup> Agaknya karena borjuasi dalam tata masyarakat feodal pernah menjadi kelas menengah, banyak pengamat menyamakan kelas menengah sebagai borjuasi. Tulisan J.A.C. Mackie “Harta dan Kuasa dalam Masa Orde Baru” dan “Uang dan Kelas Menengah” menjadi representasi kecenderungan ini. Implikasinya, karena tidak adanya borjuasi yang cukup kuat di Indonesia sering dijadikan dasar kesimpulan tidak adanya kelas menengah di Indonesia,<sup>5</sup> atau dikatakan tidak ada kelas menengah yang “sejati,” seperti halnya kapitalisme Indonesia dianggap kurang “sejati.” Kebekuan dogmatis inilah yang kemudian mendorong para sarjana menciptakan istilah-istilah seperti “kapitalisme semu” (*ersatz capitalism*),<sup>6</sup> “kelas menengah tersamar dan

---

<sup>2</sup>Heryanto memberikan daftar pustaka Indonesia tentang kelas menengah Indonesia hingga akhir 1989 berjumlah 63 buah, lihat Heryanto, “Kelas Menengah Indonesia: Tinjauan Kepustakaan,” 68-71.

<sup>3</sup>Laporan *Kompas* tahun 1986 dapat dilihat dalam tinjauan kepustakaan yang dikerjakan Heryanto atau dalam Richard Tanter & Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1993). Laporan *Kompas* tahun 1996 dikoleksi dan dimuat oleh Hadi Jaya, *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil* (Yogya: Tiara Wacana, 1999). Sementara laporan tahun 1997 berjudul *Menyibak Misteri Kelas Menengah Asia Tenggara*, 11 Agustus 1997, koleksi penulis.

<sup>4</sup>Heryanto, *Kelas Menengah yang Majemuk*, 11.

<sup>5</sup>John S. Nimpoeno., “Mencari Golongan Menengah dan Perilakunya,” *Prisma*, No. 2 (Februari 1984). Richard Tanter & Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, II/1996).

<sup>6</sup>Istilah *ersatz capitalism* dipopulerkan oleh Yoshihara Kunio dalam makalahnya yang berjudul “Ersatz Capitalism in Southeast Asia”, pada seminar yang diadakan majalah Warta Ekonomi di Jakarta, 21 Juni 1990.

terapung,” “kelas menengah semu,” atau “kelas menengah bukan dalam pengertian sebenarnya.”<sup>7</sup>

Ketiga, pembahasan kelas menengah Indonesia cenderung monolitik dan homogen, kurang apresiatif terhadap kemajemukan struktur kelas dan kemajemukan segmen di dalam kelas itu sendiri. Mereka yang mempunyai kedudukan kelas sama tidak selalu dan tidak dalam semua hal bertingkah seragam. Sebaliknya, mereka yang makan dengan menu yang sama, berjumlah gaji sama, belum tentu menduduki tempat kelas dan struktur produksi yang sama.<sup>8</sup>

Bila kelas menengah diperbincangkan sebagai kelompok yang monolitik, timbul pertanyaan: di kelas sosial manakah kelompok yang lain berada? Apakah kita yang tidak memiliki selera atau gaji setingkat manajer, misalnya, punya kelas sosial? Lantas di mana posisi kelas para mahasiswa, santri, aktivis LSM, kiai dan ulama, perempuan, pekerja sosial, seniman, penganggur, pensiunan? Di mana batas antar kelas menengah, atas, dan bawah?

Keempat, munculnya harapan yang terlalu berlebihan pada kelas menengah ketimbang merumuskan kriteria-kriteria dari kelas menengah itu sendiri. Ada semacam idealisasi bahwa seolah kelas menengah adalah agen perubahan sosial, berwatak heroik, progresif, pejuang demokrasi, atau bahkan revolusioner. Dalam perbincangan kelas menengah Indonesia, peran paling menonjol yang diharapkan adalah tampilnya kelas menengah Indonesia dalam proses perubahan dan demokratisasi.<sup>9</sup>

Idealisasi semacam itu ternyata membuahkan kekecewaan karena realitas kelas menengah Indonesia jauh panggang dari api. Mereka yang diharapkan tampil sebagai demokrat ternyata bermuka oportunistis, konformis, atau konservatif. Maka yang terjadi kemudian adalah keluhan, ratapan, kecaman bahwa kelas menengah di Indonesia sebetulnya belum terbentuk. Kalaupun ada,

---

Ersatz berasal dari kata Jerman yang berarti “substitusi” atau “pengganti”. Kata ini kemudian dipakai dalam bahasa Inggris, dalam arti sedikit berbeda, yakni “pengganti yang lebih inferior”. *Ersatz capitalism* berarti bukan kapitalisme yang tulen alias kapitalisme semu. Tulisan lengkap mengenai istilah ini baca buku Yoshihara Kunio, “Kapitalisme Semu Asia Tenggara,” terjemahan dari *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia* (Jakarta: LP3ES, II/1991). Pengantar kritis terhadap konsep yang dibawakan Kunio ini ditulis oleh Arief Budiman, xiii-xxvi.

<sup>7</sup>Lihat misalnya Mochtar Lubis, “Kesemuan Kelas Menengah Indonesia,” dalam *Happy Bone Zulkamain, et al., ed., Kelas Menengah Digugat* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 107-125; wawancara *Prisma* dengan Saparinah Sadli (2/1984)

<sup>8</sup>Heryanto, “Memperjelas Sosok yang Samar”, dalam pengantar dalam Richard Tanter & Keneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, xviii

<sup>9</sup>Sejumlah tulisan yang mengaitkan atau mengharapkan peran kelas menengah dalam proses demokratisasi di tanah air terdapat pada bunga rampai yang dikumpulkan Hadi Jaya, *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*; Andito, ed., *Menggusur Status Quo* (Bandung: Rosdakarya, 1998); dan Happy Bone Zulkamain et al., *Kelas Menengah Digugat*. Beberapa artikel lain yang tidak tercover ke dalam tiga buku tersebut tersebar di harian *Republika*, *Merdeka*, dan *Media Indonesia* (koleksi penulis).

masih belum matang, semi kelas menengah atau kelas menengah semu. Atau dalam ungkapan John S. Nimpoeno, golongan menengah yang belum golongan menengah.<sup>10</sup>

Padahal, bahkan sejak kelahirannya, kelas menengah tidak pernah seragam. Bahwa kelas menengah di Eropa, Amerika dan Jepang memiliki peran yang signifikan dalam proses perubahan dan pembaruan sosial, ekonomi, dan politik adalah sebagian dari fakta sejarah yang memang dominan dalam wacana kelas menengah. Namun, sejatinya kelas menengah tidak seragam dan bisa diseragamkan. Daniel S. Lev mengatakan bahwa secara politik banyak dari kelas menengah bersekutu dengan rezim, sebagian lainnya tidak mengambil peran apapun, sementara yang lain tetap mengambil prakarsa untuk mengembangkan gerakan pembaruan dalam satu dan lain bentuk.<sup>11</sup> Bahkan mereka, kata Heryanto, kadang-kadang tampil sebagai oportunis politik atau ekonomi, penjiat, *plin-plan*, atau pejuang hak asasi dan tertib hukum atau bahkan aktivis radikal. Di Indonesia, lanjut Heryanto, banyak yang berilusi tentang kelas menengah seperti di Barat yang berwatak progresif. Padahal, seperti disinyalir Gouldner dan sejumlah penulis lain, borjuis Eropa adalah penjiat kelas atas sebelum mereka mampu menggulingkan kekuasaan tersebut.<sup>12</sup>

Kejamakan dan kemajemukan kelas menengah ini juga memberikan kesimpulan perlunya menghindari “pembelahan kelas” baik berdasarkan sekat-sekat geografis (desa-kota), agama (Islam-non Islam), dan gender (laki-laki dan perempuan).<sup>13</sup> Studi Kenneth Young tentang birokrat, petani dan kelas menengah, memberikan kesaksian munculnya kelompok-kelompok dominan dan menengah di pedesaan Jawa, seperti tuan tanah, pedagang, wiraswasta, dan elit desa. Mereka disebut “menengah” dalam pengertian bahwa mereka bukan borjuis ataupun buruh.<sup>14</sup> Seperti rekan-rekan mereka di kota, kelas menengah pedesaan ini memiliki karakteristik, perilaku, gaya hidup dan kepentingan kelas yang kurang lebih serupa tapi tak sama. Hal yang sama terjadi jika pembahasan ini ditambah dengan melibatkan unsur gender.

### **Muslim Kelas Menengah di Indonesia: Lintasan Sejarah**

Mencari jejak kelas menengah Indonesia secara konseptual dan teoretis cukup rumit bila dikaitkan dengan model kelas menengah yang terjadi di Eropa

<sup>10</sup>John S. Nimpoeno, “Mencari Golongan Menengah dan Perilakunya.”

<sup>11</sup>Daniel S. Lev, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1993).

<sup>12</sup>Heryanto, *Memperjelas Sosok yang Samar*, xx.

<sup>13</sup>Istilah “pembelahan kelas” ini diilhami oleh protes Susan Abeyasekera pada saat Konferensi tentang Politik Kelas Menengah Indonesia di Monash University, 27-29 Juni 1986.

<sup>14</sup>Kenneth Young, “Birokrat Menengah, Petani Menengah, Kelas Menengah?,” dalam Richard Tanter & Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*.

ketika borjuis dan kelas buruh muncul. Untuk kasus Indonesia, sebagaimana terjadi di tempat lainnya, “kelompok kelas menengah berlangsung dalam jangka waktu lama dan kompleks.”<sup>15</sup> Namun, ciri khas kelas ini ditandai dengan sikap independensinya dari otoritas pemerintah kolonial, yaitu dengan cara mengambil jarak dengan penguasa atau bahkan bersifat antagonistik terhadap pemerintahan kolonial. Kelompok Muslim bisa dijadikan contoh menarik kelas menengah Indonesia, paling tidak karena rentang sejarah Islam yang cukup lama dan perkembangannya di kota dan desa cukup kuat. Sebagaimana kemunculan Islam dibarengi dengan perdagangan terutama di daerah pesisir, kemunculan Muslim kelas menengah Indonesia (kelompok santri) juga tidak bisa dilepaskan dari perdagangan (kapitalisme) sebagai basis sosial. Beberapa tempat seperti Kotagede di Yogyakarta, Laweyan di Surakarta dan Kauman di Kudus adalah pusat-pusat perniagaan yang cukup menonjol di masa itu.<sup>16</sup> Pada masa ini, kebangkitan kelompok (kelas) menengah didorong oleh kepentingan, hasrat ekonomi dan politik serta perjuangan ideologi masa penjajahan dan persaingan bisnis antara etnis Cina dan pribumi. Penguatan kelas menengah selanjutnya diawali dengan gerakan solidaritas pribumi versus non-pribumi (melawan hegemoni kolonial) dengan pola *religio-economic development*. Tipe gerakan borjuis ini ditopang oleh pribumi yang terdiri atas pengusaha dan cendekiawan. Pertekstilan dan batik menjadi komoditas perdagangan yang utama saat itu, ditambah dengan industri rokok seperti ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pesaing utama usaha tekstil adalah Cina dan barang-barang impor dari luar negeri. Tegal, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kediri dan Tulungagung menjadi basis industri tekstil rumahan. Model *home industry* ini menandakan bahwa manufaktur dan pabrik masih menjadi milik modal asing.<sup>17</sup> Berhadapannya pribumi dan non-pribumi (kolonial) membangkitkan kesadaran keagamaan dan kebangsaan bagi komunitas Jawa saat itu. Disamping perdagangan, kebangkitan kelas menengah juga didorong oleh faktor pendidikan, terutama bagi kelompok bangsawan (priayi) yang memiliki peluang untuk diangkat sebagai pegawai negara dan perusahaan swasta.

Di masa pemerintahan kolonial, kemajuan para santri dalam perdagangan mencapai titik klimaksnya ketika didirikannya Sarekat Dagang Islam di Betawi

---

<sup>15</sup>Daniel S. Lev, “Kelompok Tengah dan Perubahan di Indonesia,” dalam *Politik Kelas Menengah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1993), 26.

<sup>16</sup>Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), 55.

<sup>17</sup>Mitsuo Hiroshi, *The Development of Javanese Cotton Industry* (Tokyo: The Institute of Developing Economics, 1970). Lihat juga Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1998), 79.

tahun 1909 dan diikuti oleh Sarekat Dagang Islam di Surakarta tahun 1911 oleh RM. Tirtoadisoerjo dan berganti nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1913. Sebagai organisasi non-politik, SI memiliki kegiatan utama pada bidang sosial dan ekonomi. Usaha-usaha SI untuk mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi cukup penting terutama ketika persaingan dalam ekonomi menguat dimana pribumi mulai tersingkir. Salah satu alasan berdirinya organisasi ini, selain hegemoni kolonial Belanda, adalah menguatnya kekuatan Cina dalam sistem perdagangan, sedang pribumi (Islam) sangat terbelakang khususnya dalam persaingan perusahaan batik di daerah Surakarta. Kekuatan Cina dalam usaha batik ini yang berhasil menguasai bahan-bahan impor menumbuhkan kesadaran pribumi yang dimotori oleh Haji Samanhoe di dengan mendirikan Sarekat Islam di Surakarta (Solo).<sup>18</sup> Pada perkembangan selanjutnya, organisasi ini tidak saja diikuti oleh kaum pedagang tetapi juga oleh kalangan priayi, petani dan militer. Kehadiran SI, di samping sebagai awal kesadaran keagamaan (umat) para pedagang Muslim kelas menengah juga didorong oleh usaha untuk melawan dominasi Cina yang mendapatkan hak-hak istimewa dari pihak kolonial Belanda. Misi gerakan sosial, ekonomi dan keagamaan Sarekat Islam kemudian dikembangkan oleh tokoh yang sangat berpengaruh yaitu Cokroaminoto dan Agus Salim. Kedua tokoh ini banyak mengenyam pendidikan Hindia Belanda yang kemudian menjadi motor penggerak timbulnya kesadaran nasionalisme atas tekanan kolonial.

Sebelum menjadi Partai Sarikat Islam, misi didirikan Sarikat Islam tertuang dalam Anggaran Dasarnya, yaitu bertujuan untuk memajukan perdagangan, menolong anggota-anggotanya yang susah, memajukan kehidupan kerohanian, meluruskan pendapat-pendapat yang salah tentang Islam, memajukan kehidupan keagamaan sesuai dengan hukum dan kebiasaan Islam.<sup>19</sup> Menurut Pijper sendiri, kekuatan Sarekat Islam sangat menonjol di masyarakat sebelum ia meleburkan diri menjadi partai. Setelah masuk menjadi partai politik, gerakan Sarekat Islam lambat laun pengaruhnya menurun.<sup>20</sup>

Kemunculan Muslim kelas menengah kemudian diperkuat dengan berdirinya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 setahun setelah berdirinya Sarekat Islam. Disamping sebagai tokoh agama, Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai saudagar yang cukup berhasil. Karena itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa gerakan ekonomi telah mendorong menguatnya Muslim kelas menengah di Nusantara disamping penguatan

---

<sup>18</sup> George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi*, terj. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990), 53-54.

<sup>19</sup> G.F. Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tujimah dan Yessy Augusdin (Jakarta: UI Press, 1985), 107.

<sup>20</sup> G. F., Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*.

pendidikan. Kelahiran Muhammadiyah dengan demikian tidak saja karena adanya kesadaran tokoh Islam dengan munculnya sinkretisme Jawa (*bid'ah*), tetapi juga didorong karena mundurnya pendidikan dan ekonomi masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Gerakan Islam modernis Muhammadiyah mendapat sambutan yang sangat luas dikalangan masyarakat kota, khususnya akademisi (kelompok intelektual) dan para pengusaha. Misi utama Muhammadiyah dalam kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan telah melahirkan para sarjana dan kaum terdidik tersebar di masyarakat. Sistem pendidikan modern dengan klasikal mulai diperkenalkan dalam pengajaran di sekolah dibarengi dengan didirikannya rumah sakit, panti asuhan dan gerakan kaum perempuan, Aisyiyah. Kebangkitan gerakan perempuan di Muhammadiyah juga dipengaruhi subordinasi perempuan atas laki-laki terutama dalam wilayah publik. Sebagai bagian penting dari Muhammadiyah, Aisyiyah berhasil membangkitkan partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial keagamaan seperti majelis taklim dan pengasuhan anak yatim. Untuk tingkat gerakan pemuda, Muhammadiyah juga diperkuat dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Gerakan sistematis Muhammadiyah ini menjadi penggerak modernisasi Indonesia. Dengan kata lain, Muhammadiyah adalah bagian terpenting dari *civil society* yang berhasil mengangkat Muslim kelas menengah dalam mengembangkan demokratisasi Indonesia.

Di samping santri modernis (Muhammadiyah) yang berbasis di perkotaan, santri tradisional (Nahdhatul Ulama) di tingkat pedesaan mulai menampakkan pengaruhnya bagi komunitas petani. Seperti halnya tradisi daerah pertanian, model kepemimpinan kelompok tradisional lebih bersifat kharismatik otoriter, dimana kiai yang utamanya memiliki pesantren (*pondok*) memiliki peran dominan bagi santri dan komunitas pedesaan. Dari sinilah kekuatan NU menyebar di pelosok pedesaan dan pendekatan kulturalnya menghasilkan komunitas yang terhubungan secara solidaritas mekanik. Pengaruh NU dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa terlihat dengan berdirinya ratusan pondok pesantren di pelosok pedesaan dan menyatu dengan komunitas desa. Karena itu, tidak mengherankan bahwa komunitas NU, bagi pemerintahan kolonial Jepang hingga pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, telah dijadikan basis politik yang cukup penting.

Gerakan Muslim kelas menengah terus menguat ketika pada tahun 1937 Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) berdiri sebagai upaya untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas umat Islam. Kehadiran MIAI mendapat sambutan positif dari pemerintahan Jepang yang kemudian membantu mendirikan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), sebagai perwujudan federasi organisasi-organisasi Muslim baik yang beraliran modernis maupun

tradisionalis, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Persaingan dan perbedaan yang sering muncul dari kalangan modernis dan tradisionalis mereda sehingga kekuatan Islam dipersatukan. Pada masa pendudukan Jepang, kepemimpinan nasional umat mulai menguat. Ini berbeda halnya ketika masa penjajahan Belanda. Bahkan Jepang lebih memilih kaum santri untuk dijadikan partnernya dari pada kelompok priayi. Kebijakan ini diambil karena Jepang mengharapkan kekuatan massa rakyat untuk kepentingan perang mereka. Maka itu didirikanlah Hizbullah, yaitu para militer yang direkrut dari orang-orang Islam yang dipersiapkan untuk melawan musuh-musuh Jepang. Pada masa Jepang juga didirikan Kantor Urusan Agama (1942), yang pada tahun 1944 dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim dari NU. Di antara kegiatan lembaga ini adalah melatih para penghulu dan kiai. Pelatihan ini telah mengenalkan berbagai macam pengetahuan keagamaan, administrasi pemerintahan dan politik modern. Mereka yang telah dilatih pada masa itu tidak kurang dari 1.020 pemuka agama.<sup>21</sup>

Setelah Indonesia merdeka, peran Masyumi berubah menjadi kekuatan politik kelompok santri baik tradisionalis maupun modernis. Peran penting dari Masyumi terlihat jelas ketika terjadi perdebatan di Dewan Konstituante pada tahun 1950-an yang membahas masalah dasar negara. Kelompok santri (Masyumi) menginginkan negara berlandaskan Islam sedang kelompok nasionalis (priayi dan abangan) lebih memilih netral dari urusan agama (Pancasila). Menurut Kuntowijoyo, “perseteruan antara dua kelompok ini, terutama tentang dasar negara adalah penyakit lama masa lalu, yakni sikap saling mencurigai antara santri dengan priayi, antara santri dengan kaum abangan, memantul dalam pertentangan politik modern.”<sup>22</sup> Pertentangan yang paling radikal antara dua kelompok ini memunculkan kelompok baru seperti Darul Islam di Jawa Barat pada tahun 1948. Gerakan ini bertujuan menumpas komunis dan mendirikan negara Islam. Kelompok ini mendapat dukungan dari berbagai tempat seperti Aceh dan Sulawesi. Kekuatan gerakan Islam radikal utamanya muncul dari kekuatan Hizbullah yang berdiri pada masa penjajahan Jepang. Diawali dengan gerakan Islam radikal ini, kekuatan Islam politik pada perkembangan selanjutnya akan mengalami kesulitan, terutama ketika Orde Baru memegang tampuk kekuasaan.

Kekuatan kultural Muslim kelas menengah dari NU pada masa kolonial hingga awal masa pendudukan Jepang terus menguat dibanding Sarekat Islam yang berubah haluan menjadi partai Sarekat Islam yang pengikutnya terus

---

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, ed., AE Priyono (Bandung: Mizan, 2008), 100. Lihat juga Nieuwenhuijzen, *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia* (The Hague: N. V. Uitgeverij W. Van Hoeve, 1958), 130.

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*.

menurun. Kekuatan ini ditopang dengan adanya Muhammadiyah (kelompok modernis) yang sama-sama menjaga diri independen dari kepentingan politik kolonial. Keberhasilan kelas menengah Muslim dengan kekuatan kultural yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah adalah penolakan kedua lembaga agama ini terhadap kebijakan penguasa Hindia Belanda terhadap hukum adat dan Islam di pengadilan-pengadilan. Kasus menonjol yang ditolak oleh kedua ormas Islam ini adalah sebuah draf hukum perkawinan yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Campur tangan Hindia Belanda yang tidak bisa ditolerir oleh dua organisasi Islam terbesar di Nusantara ini diakhiri dengan dibekukannya aturan itu dan tidak pernah dipakai kembali.<sup>23</sup> Dengan demikian Muslim kelas menengah dari kalangan tradisional dan modernis telah menjadikan kuatnya *civil society* dalam mengcounter hegemoni penguasa.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor Islam dan nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan tidak bisa dipisahkan. Seperti sering dikatakan bahwa *ḥubb al-waṭan min al-īmān* (cinta tanah air termasuk implementasi keimanan), Muslim Indonesia melihat dirinya untuk mencintai tanah air dalam rangka merealisasikan ajaran Islam. Karena itu tidak mengherankan bahwa setelah kemerdekaan gagasan tentang pelaksanaan syariat menjadi bagian terpenting konsep konstitusi negara, seperti tertuang dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada tahun 1945. Seperti dijelaskan di atas, pada saat terjadi perdebatan di Dewan Konstituante, di mana kelompok santri menggagas penggabungan Islam dan negara dalam satu kesatuan utuh masih terlihat hingga Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Menjadikan Islam sebagai ajaran sekaligus ideologi akan terasa sepanjang perjalanan politik Islam Indonesia, walaupun ditemukan model gerakan yang berbeda-beda untuk mendapatkan ruang yang lebih leluasa. Namun perlu dicatat bahwa politisasi agama (Islam) selalu tidak mendapat tempat di kalangan umat Islam sendiri. Justru yang menonjol dan mendapat sambutan kuat adalah gerakan Islam kultural yang sekarang banyak dilakukan oleh kalangan Muslim kelas menengah. Gerakan kultural Islam telah memperkuat lahirnya kelompok profesional Muslim setelah terjadinya urbanisasi dan masuknya keluarga santri ke dunia pendidikan umum (sekuler). Dengan adanya transformasi gerakan Islam dari politik ke kultural, khususnya pada masa Orde Baru, telah mendorong menguatnya Muslim kelas menengah di lapisan birokrasi, LSM, partai politik dan akademisi. Kekuatan kelas menengah ini terlihat jelas ketika ICMI didirikan, yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur masyarakat profesional.

---

<sup>23</sup> Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 50.

### Islam dan Orde Baru

Seperti diketahui, sejak Orde Baru berkuasa pada akhir 1960-an, hubungan Islam dan negara dipenuhi ketegangan. Ini disebabkan, sejak awal, Soeharto menerapkan strategi deideologisasi dan deislamisasi. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap kelompok-kelompok Islam memaksa Soeharto pada awal 1970 menyederhanakan partai-partai politik yang ada. Tidak cukup dengan penyederhanaan partai-partai Islam, pada akhir 1970-an Soeharto melakukan penyeragaman ideologi untuk semua organisasi sosial dan politik dengan dikeluarkannya Asas Tunggal, di mana Pancasila dijadikan landasan ideologi satu-satunya. Sejak saat itu, hubungan Islam dan negara berada pada titik nadir.

Dapat dikatakan, sejak saat itu sejumlah kelompok Islam, baik kalangan modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah dan orang-orang eks Masyumi, maupun kalangan tradisional yang diwakili NU, mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Meski demikian, kedua kelompok ini tidak berarti tinggal diam. Kelompok pertama melakukan perubahan paradigma, dari politik ke pendidikan dan dakwah. Langkah ini diambil oleh M. Natsir, tokoh eks Masyumi yang mendirikan DDII, yang fokus pada dakwah di daerah-daerah terpencil untuk mencegah kegiatan misionaris Kristen. Sementara itu, NU kembali ke pesantren dan menebalkan tekadnya untuk menjadi organisasi sosial keagamaan dengan kembali kepada *khittah*-nya tahun 1926.

Dalam dua dasawarsa pertama kekuasaan Soeharto, kelompok Muslim hampir tidak mendapatkan peran yang penting dalam struktur pemerintahannya. Ketimbang melibatkan kaum Muslim dalam pemerintahannya, Soeharto mengajak kelompok non-Muslim. Keputusannya ini tampaknya dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa kaum Muslim akan ‘mengganggu’ kekuasaannya. Soeharto tampaknya ingin memapankan terlebih dahulu kekuasaan sebelum mengajak pihak-pihak tertentu untuk masuk ke dalam kekuasaannya. Dengan dukungan penuh ABRI dan Golkar, sebagai mesin politik, ia berhasil mengontrol kekuasaannya selama lebih dari tiga puluh tahun.<sup>24</sup>

Pada 1980-an, sebagai akibat dari kebijakan ekonomi pemerintah yang menyokong konglomerasi, muncul sejumlah konglomerat yang sebagian besar berasal dari etnis Tionghoa. Sebagian besar kaum Muslim hanya melakukan kegiatan ekonomi pada tingkat menengah ke bawah, itu pun dalam sektor informal. Pada akhir 1980-an, terdapat perubahan penting dalam pendekatan Soeharto terhadap umat Islam. Perubahan ini merupakan anti-klimaks dari

---

<sup>24</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 58-83.

hubungannya yang terlalu dekat dan terlalu baik dengan kalangan minoritas. Diceritakan bahwa ia marah sekali ketika ditanya oleh L.B. Murdani, seorang Katholik dan Panglima ABRI pada saat itu, mengenai bisnis anak-anaknya yang semakin menggurita. Segera setelah kejadian tersebut, Murdani dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Feisal Tandjung, seorang jenderal Muslim. Setelah kejadian tersebut, hubungan Soeharto dengan kelompok minoritas semakin buruk. Sebaliknya, hubungannya dengan kelompok Muslim semakin jelas. Hubungan tersebut memasuki babak baru.

### **Orde Baru dan Islam Kultural**

Soeharto tampaknya menyadari bahwa bila ia ingin tetap berkuasa, mau tidak mau ia harus mendengar aspirasi kalangan mayoritas. Legitimasi sesungguhnya datang dari kalangan mayoritas, bukan minoritas. Dalam tahun-tahun terakhir kekuasaannya, ia mendekati kaum Muslim dan menerapkan politik akomodasi Islam. Alasan lain atas perubahan ini berhubungan dengan fenomena kebangkitan Islam yang tengah terjadi di Tanah Air. Perkembangan ini sebagiannya sebagai akibat dari proyek pendidikan yang dilaksanakan pada tahun-tahun pertama kekuasaannya. Akibatnya, pada akhir dasawarsa 80-an dan awal 90-an, muncul kalangan intelektual Muslim yang cukup berpengaruh di masyarakat. Dengan demikian, Islam dipandang terlalu penting untuk dikesampingkan begitu saja. Pada tahun-tahun tersebut sejumlah kebijakan, seperti sistem perbankan Islam, pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), penerapan hukum Islam meski terbatas, kebolehan mengenakan jilbab dan busana Muslim di sekolah-sekolah umum, penerbitan buku-buku Islam, dan penyiaran acara-acara keislaman di televisi diterapkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat Muslim.

Kebijakan tersebut lalu diikuti dengan langkah-langkah lainnya yang cukup mengejutkan. Sudah lama diketahui bahwa Soeharto, meskipun secara formal Muslim, lebih tertarik—bahkan konon mempraktikkan—kebatinan Jawa. Untuk menghapus kesan yang terlanjur melekat tersebut, tiba-tiba saja pada 1991 Soeharto pergi ke Mekkah beserta seluruh anggota keluarga untuk menunaikan haji dan menambah 'Muhammad' pada namanya, Haji Muhammad Soeharto. Sejumlah pemimpin Muslim menyambut baik perkembangan ini. Mereka percaya bahwa Soeharto benar-benar berubah dan berupaya berbuat baik untuk kaum Muslim. Tampak sekali bahwa Soeharto ingin meyakinkan masyarakat Muslim bahwa ia benar-benar berubah. Namun beberapa tokoh Islam menganggapnya secara kritis bahkan sinis. Semua itu dilakukan agar ia bisa kembali berkuasa.

Menguatnya kelas menengah Muslim ini bukanlah fenomena yang unik bagi Indonesia. Di tempat lain pun fenomena yang sama terjadi, baik di

Aljazair, Iran maupun Malaysia. Dengan kata lain, fenomena ini merupakan peristiwa global yang menimbulkan dua konsekuensi besar dalam politik global, pertama penyebaran nilai-nilai demokrasi di negeri-negeri yang baru mengenal demokrasi; dan kedua, munculnya isu-isu agama dan etnik dalam wacana publik. Pada saat itu terjadi penguatan identitas keislaman di Perancis, dan gerakan keislaman di dunia Muslim. Untuk kasus Indonesia, fenomena ini membawa pada pelebaran atau perluasan ruang publik, yang pada mulanya terdapat banyak batasan, sehingga memungkinkan setiap anggota masyarakat bisa bicara dengan bebas nilai-nilai kesetaraan dan demokrasi.

Dapat dikatakan bahwa pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), adalah proyek akomodasi Islam yang paling besar. Meskipun sejumlah kalangan bersikap kritis atau apatis atas pendirian ini, namun pendirian ICMI, seperti dikatakan Martin van Bruinessen, “adalah mahkota bagi munculnya kekuatan kelas Muslim menengah.”<sup>25</sup> Dengan kata lain, meskipun kehadiran ICMI sangat politis, namun ia merupakan dampak sosiologis dari menguatnya kelas menengah Muslim perkotaan. Kelompok ini membentuk apa yang disebut “santri baru.” Berbeda dengan pengertian tradisional santri, “santri baru” tidak mesti orang yang pernah belajar di pesantren. Meski sebagian dari mereka pernah mengenyam pendidikan di pesantren, namun selanjutnya mereka mendapatkan pendidikan tinggi di kampus-kampus umum dan bahkan di luar negeri. Secara sosiologi, kelompok santri baru adalah generasi muda yang memiliki gairah yang begitu tinggi untuk mempelajari dan mempraktikkan agama dalam kehidupan masyarakat. Periode kemunculan santri baru ini ditandai oleh maraknya kehidupan agama di tengah masyarakat, pengajian di berbagai tempat, pendirian lembaga pendidikan Islam, busana Muslimah, dan lain sebagainya.

Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil digenjot oleh Orde Baru membawa dampak perjamuran kota metropolitan dan megapolitan di berbagai daerah. Di kota-kota besar ini kelompok Muslim kelas menengah bergeliat dan berkiprah di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Bila sebelumnya masyarakat cenderung terbagi antara kelas atas dan kelas bawah, maka sekarang ada kelas menengah yang semakin menampakkan pengaruhnya.

Kehadiran ICMI, walaupun disinyalir karena mulai melemahnya kekuatan politik Soeharto, tetap tidak bisa dipisahkan dari menguatnya Muslim kelas menengah profesional. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) diterima sebagai asosiasi intelektual yang dipimpin Habiebie, menteri Riset dan

---

<sup>25</sup> Martin van Bruinessen, *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia* (ISIM and Utrecht University, 2003).

Teknologi zaman Orde Baru. Kebangkitan ICMI sebagai kekuatan kelompok Muslim kelas menengah bukan tanpa halangan yang berarti, terutama dari faksi militer yang dimotori oleh Benny Moerdani. Tepatnya pada bulan Januari 1989, pertemuan kelompok intelektual Muslim di Kaliurang Yogyakarta dibubarkan aparat militer atas perintah Benny.<sup>26</sup> Pertemuan ini sebenarnya dirancang untuk mempersiapkan berdirinya ICMI. Beberapa pandangan menjelaskan bahwa sikap akomodatif Soeharto terhadap Islam ditandai dengan melemahnya hubungan harmonis ABRI dan Soeharto. Karena itu, ia melihat kelompok Islam sebagai satu-satunya komunitas yang dapat melanggengkan posisinya.

Di samping peran politik Soeharto dalam memainkan kelompok Islam sebagai pion untuk menghadapi kelompok yang sakit hati terhadap Soeharto dan faksi ABRI, peran kelas menengah Muslim cukup berarti. Kelompok petisi 50, baik dari kelompok militer dan sipil adalah salah satu kelompok yang intens mengkritik kebijakan politik Soeharto. Tepatnya setahun sebelum berdirinya ICMI, pada awal 1989, kelompok Islam mendapat dukungan pemerintah dengan diberlakukannya aturan UU no. 7 tahun 1989 tentang kesamaan kedudukan lembaga Peradilan Agama dengan Peradilan Negeri, dimana sebelumnya Peradilan Agama masih berada di bawah subordinasi Peradilan Negeri. Pengakuan pemerintah atas lembaga Peradilan Agama adalah sebagai hasil diplomasi Munawir Sjadzali, mantan diplomat yang terlahir dari keluarga santri yang menampilkan Islam moderat dan akomodatif terhadap kebijakan Orde Baru.

Menguatnya Islam, yang utamanya dimotori oleh kelompok profesional seperti akademisi, birokrat, aktifis LSM dan usahawan, memunculkan semangat keislaman di masyarakat. Dimulai dari acara seremonial perayaan hari besar agama dan nasional, simbol keislaman tidak lagi menjadi bagian yang tabu atau *phobia*. Ucapan salam (*al-salāmu'alaikum*) dalam pembukaan pidato telah diadopsi menjadi ucapan salam nasional. Fenomena seperti ini juga merambat pada wilayah acara-acara keagamaan baik yang insidental maupun yang rutin. Kegiatan rutin shalat Jum'at, misalnya, sering diadakan tidak lagi terbatas di masjid, tetapi sudah dilakukan di hotel-hotel dan lembaga-lembaga pemerintah. Jilbab, sebagai pakaian Muslimah, boleh digunakan oleh pegawai pemerintahan. Ketika Ramadhan tiba, buka bersama atau acara tarawih bersama telah menjadi rutinitas yang umum. Perubahan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari menguatnya Muslim kelas menengah di masyarakat sehingga memiliki kekuatan *bargaining* yang tinggi. Masalah identitas agama, pada kasus seperti ini, menjadi sulit untuk dihindari atau diabaikan begitu saja. Menyadari peran Muslim seperti ini, tentu bagi Soeharto tidak menjadikan

---

<sup>26</sup> Hefner, *Civil Islam*, 130.

pilihan untuk berkonfrontasi, tetapi ia memilih bagaimana mengakomodir kondisi seperti ini menjadi produktif.

Berdirinya ICMI dapat dihubungkan dari proses transformasi kampus dari kegiatan dakwah, seperti di masjid Salman Bandung. Pilihan utama Malang, Universitas Brawijaya sebagai tempat dimana ICMI diresmikan menjadi pertanda bukan saja menghindari tuduhan pemerintah tentang Islam “fundamentalis” (negara Islam) bila dilakukan di perguruan tinggi Islam, tetapi juga menggambarkan bahwa Islam telah masuk dan diterima kalangan perguruan tinggi umum. Dilihat dari komposisi pengurus ICMI yang lahir saat itu, orang-orang seperti Wardiman dan Habiebie adalah representasi teknokrat, yang *by training* bukan dari lingkungan santri. Mereka muncul dari Muslim kelas menengah dengan semangat keislaman yang tinggi. Kehadiran mereka di ICMI dan menjadi bagian penting kelompok Muslim merupakan bagian dari mata rantai eksistensi Islam di masyarakat. Berdirinya ICMI merupakan momentum Islam kultural yang bangkit ketika Islam politik selalu mendapat tekanan. Bahkan mungkin ICMI bisa dilihat sebagai *entry point* bagaimana Muslim kelas menengah melihat ke depan bahwa tantangan modernitas dan demokratisasi perlu mempertimbangkan eksistensi Islam.

Selain itu, dalam memperkuat jaringan komunikasi dan ekonomi, pada tahun 1990 koran *Republika* dan Bank Mu’amalat didirikan. Kedua lembaga ini secara langsung mendapat dukungan penuh Soeharto, bahkan ia sendiri memiliki saham di Bank Mu’amalat ketika awal pembentukannya. Munculnya *Republika* sebagai surat kabar nasional untuk mengimbangi kekuatan koran *Kompas* yang disinyalir menjadi milik kelompok Kristen (Katholik) tak dapat dipungkiri. Hal ini dapat dicatat, karena kelompok Islam, walaupun ia sebagai komunitas terbesar, belum memiliki jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan berbagai kelompok dengan basis media massa. Walaupun pada awalnya *Republika* membawa ciri nasional, lambat laun warna keislamannya lebih menonjol dibanding koran sekuler lainnya seperti *Media Indonesia*. Hal itu dapat dilihat, terutama di berbagai rubriknya setiap Jum’at ditemukan kolom khusus tentang masyarakat Muslim atau tanya jawab masalah keislaman. Hal ini tidak lain karena *Republika* banyak juga tangani oleh kelompok ICMI, seperti Adi Sasono dan Parni Hadi. *Republika* telah menjadi media yang cukup efektif bagi kelompok Islam.

Dalam penguatan ekonomi, Bank Mu’amalat melakukan usaha-usaha ekonomi yang bebas riba (*interest*). Untuk mendukung bank berbasis Islam, kemudian berdiri beberapa institusi-institusi pendidikan perbankan Islam baik di perguruan tinggi Islam maupun umum. Kehadiran BMI telah membuka jalan lahirnya bank syariah di beberapa bank konvensional seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Hal ini menandakan bahwa liberalisasi ekonomi

(perbankan) telah tumbuh dengan kuat pasca krisis (1997) karena menguatnya peran Muslim di perkotaan. Kenapa fenomena ini tidak muncul dari tahun 1950an di mana kelompok Islam juga kuat? Jawaban yang mudah adalah, karena Islam saat ini telah bersinergi dengan kelompok teknokrat yang belajar di perguruan tinggi umum dengan semangat keislaman yang tinggi. Dengan demikian, Islam telah mengalami metamorfosis dan readaptasi didukung dengan sosial politik yang demokratis.

Di samping itu, Dompot Dhu'afa, sebagai gerakan filantropi Islam yang berdiri tahun 1995, menjadi salah satu contoh menarik. Diawali dengan mengumpulkan dana untuk masyarakat korban banjir di beberapa daerah di Jawa Timur, *Republika* berhasil mengumpulkan uang ratusan juta rupiah untuk dana amal bagi masyarakat tidak mampu. Pengumpulan dana (*fundraising*) seperti ini kemudian diorganisir secara sistematis dalam sebuah institusi dan tidak lagi menjadi subordinat *Republika*. Gerakan *fundraising* pun berkembang pada zakat, infak, *sadaqoh* dan wakaf yang dipergunakan bukan saja untuk kepentingan konsumtif atau pertolongan cepat korban bencana alam tetapi juga untuk pengembangan masyarakat miskin desa dan kota. Sistem filantropi Islam adalah fondasi utama dalam memperkuat *civil society*. Gerakan filantropi Dompot Dhu'afa berhubungan erat dengan keterlibatan alumni perguruan tinggi umum yang banyak menekuni ekonomi, hukum dan teknik. Eri Sudewo, sekedar menyebut contoh kecil yang mengembangkan DD, adalah alumni dari ITB (Institut Teknologi Bandung). Dengan demikian, Muslim kelas menengah alumni perguruan tinggi umum (sekuler) berperan penting dalam memperkuat *civil society* sebagai bagian penting dari demokratisasi.

Terlepas dari permasalahan yang berkembang dari dinamika demokrasi Indonesia, kemunculan Muslim kelas menengah telah menumbuhkan kesadaran tersendiri bagi komunitas dunia dan politik Indonesia bahwa faktor Islam tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan bernegara. Bahkan dilihat dari pengalaman politik Indonesia, Muslim kelas menengah telah mendorong tumbuhnya demokratisasi Indonesia dengan menguatnya *civil society* di masyarakat. Tentu kekuatan Muslim kelas menengah masih menyisakan ujian cukup berat dari kelompok Islamisme yang ingin menerapkan prinsip-prinsip keislaman secara kaku. Kekhawatiran itu tentu akan bisa diatasi bila negara secara konsisten melibatkan masyarakat dalam wilayah publik bersamaan dengan penegakan *rule of law*. Sikap ekstrem anggota masyarakat mungkin akan tetap ada, di dunia yang telah lama menerapkan sistem demokrasi sekalipun. Namun sistem demokrasi akan memberikan peluang yang objektif untuk menempatkan *civility* dan independensi negara dalam menjaga warga negaranya sesuai dengan *rule of law*.

Masuknya keluarga santri ke dalam pendidikan sekuler dapat digambarkan sebagai terjadinya infiltrasi santrinisasi atau sebaliknya yaitu proses modernisasi di kalangan keluarga santri sendiri. Anak-anak Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, misalnya, masuk perguruan tinggi umum (sekuler) Universitas Indonesia. Bahkan Solahuddin Wahid sendiri adalah sarjana Teknik dari ITB. Ini menandakan bahwa bagi kelompok santri mengirim anaknya ke lembaga sekuler bukan hal yang tabu, bahkan ini telah ikut mewarnai gerakan Islam di kampus. Kiai Imam Zarkasyi, pendiri Pondok Modern Gontor Jawa Timur, juga menyekolahkan anaknya ke Universitas Gadjah Mada untuk belajar pertanian. Bahkan yang terakhir, anaknya Hasan Abdullah Sahal, salah satu pemimpin Pondok Modern Gontor saat ini, memasukkan anaknya ke UI untuk mendalami ekonomi, yang sebelumnya pernah menghafal Quran di Jawa Tengah. Dengan terjadinya mobilisasi yang kuat di kalangan santri mengenyam pendidikan di kampus umum akan berdampak kuat pada proses modernisasi di kalangan santri pada satu sisi dan santrinisasi (Islamisasi) di dunia kampus pada sisi lain. Maka tidak mengherankan, ke depan nanti fenomena ini akan berkembang menjadi suatu komunitas yang memainkan peranan penting dalam proses demokratisasi.

Gerakan politik Islam dalam ranah publik di era Soeharto hampir tidak mendapat ruang yang berarti, karena sejak awal, pemerintahan Orde Baru melihat bahwa ideologi negara harus ditempatkan pada sistem yang netral yaitu Pancasila. Seperti halnya kolonial Belanda, Soeharto menerapkan kebijakan netral terhadap Islam, walaupun secara nominal ia sendiri Muslim. Belajar dari kasus buntutnya perdebatan tentang dasar negara pada tahun 1950an di sidang dewan konstituante yang kemudian Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959 untuk kembali kepada UUD 1945, Soeharto berasumsi bahwa Islam sebagai ideologi akan tetap menjadi masalah dalam konstelasi politik negara. Karena itu, Islam bagi Soeharto perlu ditempatkan pada wilayah non-politik (sosial) saja. Hal ini dapat dilihat bahwa Soeharto memberikan dorongan berkembangnya kegiatan ritual Muslim dengan didirikannya masjid Amal Bakti Pancasila.<sup>27</sup>

Respons Soeharto terhadap kebutuhan umat Islam tidak saja didasari kepentingannya untuk mendapatkan dukungan politik tetapi juga karena menguatnya masyarakat Islam desa yang hijrah ke kota untuk studi dan mengais nasib sebagai aktifis sosial dan usahawan. Berdirinya LP3ES, P3M dan organisasi kemasyarakatan lainnya di bawah bendera Muhammadiyah dan NU menjadi penyeimbang penting kekuatan negara saat itu. Selain itu, usaha-usaha

---

<sup>27</sup> Robert Hefner, "ICMI Harus Memperjuangkan Pluralism," dalam *ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi* (Bandung: Mizan, 1995), 294-295.

kelompok Muslim yang bernuansa politik selalu mendapat tekanan yang cukup keras dari pemerintah, walaupun Soeharto naik menjadi presiden mendapat dukungan kuat dari kelompok Muslim. Keengganan Soeharto terhadap Islam politik terlihat dari penolakannya terhadap pentolan Masyumi yang berusaha untuk mendirikan kembali Masyumi baru dengan nama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) setelah Masyumi dibubarkan oleh presiden Soekarno. Bahkan sebagai tekanan yang serius, Soeharto melarang tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir untuk bepergian ke luar negeri. Tekanan politik seperti ini akhirnya mengalihkan perhatian kelompok Islam kepada kegiatan pendidikan dan dakwah.

Untuk memperlemah kekuatan Islam politik, maka Soeharto pada awal tahun 1970an memulai dengan mengurangi jumlah partai politik dari multipartai menjadi tiga: pertama, partai kumpulan Islam berada di Partai Persatuan Pembangunan (PPP); kedua, Golkar, sebagai kendaraan politik Soeharto, dan terakhir, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang merupakan kumpulan nasionalis dan non-Muslim. Pada awal perkembangannya, PPP sebagai representasi kelompok Islam mendapat dukungan kuat baik dari kalangan modernis maupun tradisional. Namun dengan kembalinya tradisional ke *khittah* 1926 pada awal 1980an—yaitu tidak terlibat aktif dalam politik—kekuatan PPP mulai melemah. Kekuatan Islam politik terus melemah dan pada akhirnya gerakan kultural seperti dakwah, pendidikan, sosial menjadi pilihan utama. Dengan strategi Orde Baru mengembalikan Islam kepada non-politik, gerakan Islam hanya berada pada wilayah sosial keagamaan. Dengan tekanan politik seperti ini, Islam yang diwakili oleh kelompok kelas menengah kembali memperkuat jalur kultural seperti halnya pada masa kolonial yang berbasis sosial, ekonomi dan keagamaan.

Kegagalan politik tradisional (NU) pada masa Orde Baru mendorong Nahdhatul Ulama menfokuskan diri pada gerakan kultural, yaitu dengan mengambil istilah “kembali kepada *khittah* 1926.” Ada yang cukup menarik dari strategi NU untuk menarik simpati pemerintah Orde Baru setelah mendapat tekanan yang cukup lama dibanding kelompok modernis manuver politiknya pada kongres di Situbondo tahun 1984. Di Situbondo, NU mengakui Pancasila yang ditetapkan pemerintah sebagai ideologi organisasinya, atau sebagai azas tunggal organisasi kemasyarakatan. Pada kongres ini, NU menarik diri dari kancah politik dan kembali ke pesantren sebagai basisnya. Dengan kata lain, ia kembali kepada gerakan sosial, ekonomi dan keagamaan. Di samping pesantren, kegiatan kultural NU merambah ke berbagai bentuk aktifitas sosial dan pendidikan; diantaranya adalah LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dan ISIS (Institut Studi Islam dan Sosial). Lembaga-lembaga ini

telah menjadikan jaringan aktivis dan intelektual kaum muda NU berhasil memberikan kritik sosial dan politik pada rezim Orde Baru terutama dalam kerangka gagasan Indonesia yang demokratis. Petani desa dan kelompok usaha menengah menjadi perhatian lembaga ini, yang lambat laun telah memperkuat kesadaran masyarakat bawah akan kepekaan sosial dan politik. Tokoh yang cukup berperan dalam gerakan Muslim tradisional adalah Abdurrahman Wahid, Muchit Muzadi, Moeslim Abdurrahman, Masdar F Mas'udi, Kiai Sahal Mahfudz dan Nasihin Hasan.<sup>28</sup>

### **Kampus dan Kelas Menengah**

Tekanan Soeharto pada Islam politik menjadi titik balik munculnya gerakan Islam kelas menengah untuk mengurus dakwah, sosial dan ekonomi. Kelompok tradisional kiai kembali memperkuat pesantren, sedang Muslim modernis berada di wilayah perkotaan dengan mengembangkan pendidikan sekolah, rumah sakit dan panti asuhan. Yang menonjol dari gerakan Muslim modernis adalah dakwah Islam. Sebagai contoh adalah Muhammad Natsir, salah satu pentolan MIAI atau tokoh Masyumi yang kemudian mendirikan organisasi dakwah Islam, DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) di Kramat Raya, Jakarta. Berdirinya DDII, disamping sebagai lembaga yang mewadahi kegiatan kelompok Muslim modernis, juga tidak bisa dipisahkan dari usaha untuk membendung gencar misionaris Kristen yang berkembang di Indonesia. DDII, dengan demikian, bukan saja sebagai institusi dakwah Islam di masyarakat *perse* tetapi juga sebagai usaha untuk mengimbangi misi Kristen tadi. Bersamaan dengan misi dakwah di daerah terpencil yang bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam mengirimkan dainya, DDII juga masuk ke wilayah perguruan tinggi umum (sekular) dalam mengembangkan dakwahnya. Salah satu keterlibatan DDII dalam dakwah di kampus adalah membantu pendirian masjid kampus Salman di ITB Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan dan Makasar. Imaduddin Abdurrahim, adalah salah satu contoh intelektual Muslim berlatar belakang teknik yang berhasil mengembangkan Masjid Salman dengan beragam kegiatan keagamaannya. Gerakan dakwah Muslim kelas menengah kemudian berhasil merekrut cendekiawan untuk tujuan dakwah dari berbagai latar belakang universitas umum (sekular), seperti dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PII (Pelajar Islam Indonesia. Mereka umumnya dilatih sebagai dosen agama Islam dan pengurus masjid kampus.<sup>29</sup> Masuknya dakwah Islam di kampus menjadi gejala proses santrinisasi kampus

---

<sup>28</sup> Robin Bush, "Redefining Political Islam in Indonesia: Nahdhatul Ulama and Khittah 26," *Studia Islamika*, Vol. 7, No. 2 (2000), 72-73.

<sup>29</sup> Yudi Latif, "The Rupture of Young Muslim Inteligentsia in the Modernization of Indonesia," dalam *Studia Islamika*, Vol. 12, No. 3 (2005), 384.

bagi mereka yang tidak mengenyam pendidikan Islam secara formal. Di sinilah kebangkitan Islam di kampus, seperti gerakan Salman di ITB Bandung, memberikan dampak langsung akan pengenalan nilai-nilai Islam (baca: islamisasi kampus). Pengaruh Salman kepada lingkungannya juga semakin kuat yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seminar, bazar bagi duafa dan program-program ekonomi untuk penduduk miskin.<sup>30</sup>

Perlu dicatat bahwa menguatnya kekuatan Islam kultural di kampus dapat dilihat juga dari dampak kebijakan yang diterapkan Soeharto kepada asosiasi mahasiswa di kampus. Belajar dari kasus Malari yang terjadi pada tahun 1974 yang dipimpin oleh Hariman Siregar sebagai protes mahasiswa UI (Universitas Indonesia) kepada kebijakan negara, pemerintah Orde Baru mencoba menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan ini berhasil meredam kekuatan politik mahasiswa dan mengembalikan kegiatan mahasiswa pada dunia akademis dan non-politik. Dengan adanya tekanan politik di kampus, mahasiswa mengalihkan kegiatannya pada aspek lain seperti gerakan sosial dan dakwah. Di ITB misalnya bermunculan *halaqah*. Kegiatan pengajian dan aktifitas sosial lainnya banyak difasilitasi kelompok DDII. Peran dakwah di kampus juga ikut mempengaruhi dunia luar kampus secara perlahan terutama setelah para alumninya terlibat di birokrasi, bisnis dan gerakan aktifis. Disini nanti akan terlihat diseminasi *Islamic knowledge* dan menguatnya nilai-nilai Islam di wilayah publik dengan mengambil simbol-simbol Islam.

Beberapa gejala Islam kultural yang berkembang di kampus memiliki ragam yang berbeda beda dari satu kampus ke kampus lainnya. Namun secara umum, simbol-simbol Islam dan nilai-nilai keislaman diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Bagi mahasiswi, jilbab mulai banyak dipakai menggantikan pakaian *jeans* atau kaos pendek. Seni musik yang bernuansa rohani, seperti lagu-lagu bimbo, juga disukai masyarakat kampus, di mana sebelumnya musik rock dan jazz lebih digemari. Bagi mahasiswa, kegemaran berpeci atau memanjangkan jenggot adalah salah satu simbol keislaman. Dalam komunikasi antar sesama, ucapan salam (*al-salamu'alaikum*) digunakan untuk mempererat hubungan satu sama lain sebagai pengganti ucapan selamat pagi atau selamat siang. Kegiatan bazar amal di kampus ITB sering dilakukan terutama untuk menawarkan harga murah bagi kelompok miskin. Khitanan masal atau pengobatan gratis juga sering dilakukan dalam rangka mempererat hubungan masyarakat kampus dan penduduk miskin atau sekitarnya. Kegiatan-kegiatan sosial ini tidak bisa dilepaskan dari peranan gerakan dakwah di kampus seperti masjid Salman ITB.

---

<sup>30</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 123.

Penguatan Islam di kampus melalui pengajaran Islam sebagai dakwah sistematis telah dilengkapi dengan standarisasi isi dan sistem pengajaran dengan slogan Islam sebagai disiplin ilmu. Pada masa Orde Baru, respon dakwah, dibanding kegiatan politik, mendapat tempat yang berarti. Alamsyah Prawiranegara, menteri agama periode 1978-1983, misalnya, memberi dukungan kuat dengan adanya fenomena seperti ini. Namun sistem pengajaran Islam di kampus seperti ini kemudian ditinggalkan oleh Munawir Sjadzali, sebagai penerus kementerian agama, yang tidak menyukai formalisasi ajaran Islam.<sup>31</sup> Kelompok modernis tentu berperan penting dalam mewarnai kegiatan dakwah di kampus terutama DDII. Karena itu keterlibatan DDII di dunia kampus telah mendorong berkembangnya proses Islamisasi kampus umum (sekuler) dan meluasnya ide-ide keislaman dan menguatnya gerakan masjid kampus.

Di samping gerakan dakwah kampus, pada awal 1970-80-an, terdapat perkembangan baru dalam gerakan pemikiran Islam di Indonesia. Sejumlah aktivis muda telah hadir dan membawa angin segar dalam pengembangan wacana Islam. Nama pertama yang mungkin perlu disebut di sini adalah Nurcholish Madjid. Cak Nur, demikian ia dipanggil, melakukan lompatan strategis yang sangat berpengaruh pada perkembangan pemikiran Islam selanjutnya. Ia adalah mantan ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), organisasi mahasiswa yang dulu berafiliasi pada Masyumi. Dalam sebuah seminar di TIM (Taman Ismail Marzuki), Cak Nur mengemukakan gagasan sekularisasinya. Sekularisasi menurut Cak Nur merupakan keniscayaan. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia bersifat sekuler, termasuk di dalamnya penafsiran doktrin-doktrin keagamaan. Agama sendiri pada dasarnya adalah sekuler, karena produk pemikiran manusia. Jangan sekali-kali disakralkan, karena yang sakral hanya Tuhan saja.

Dalam bidang politik, gagasan sekularisasi ini mengharuskan politik dijauhkan dari simbol-simbol keagamaan, yang kerap kali menjadi sumber perpecahan ketimbang kekuatan pemersatu. Namun tetap saja ia setuju agama menjadi pedoman dalam kehidupan termasuk politik. Gagasan Cak Nur ini merupakan antitesa dari pengalaman umat Islam pada masa Orde Lama. Pengamatannya yang mendalam atas pengalaman umat Islam pada masa Orde Lama yang carut marut akhirnya membuatnya berkesimpulan bahwa agama [baca: Islam] tidak bisa dijadikan ideologi politik. Ia berpendapat bahwa Islam tidak pernah berhasil menjadi ideologi politik yang efektif. Sekali Islam dibawa ke panggung politik, maka selamanya umat Islam akan terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Hal ini karena Islam sendiri sebenarnya sebuah entitas

---

<sup>31</sup> Latif, "The Rupture of Young Muslim," 384-385.

yang beragam; potensi perbedaan pendapat sejak awal sudah ada. Pemikiran Cak Nur ini terangkum dalam kata-katanya yang terkenal yang kemudian menjadi credo kalangan modernis, “Islam *Yes*, Partai-partai Islam *No*”.

Meskipun banyak orang yang menentang, termasuk di dalamnya Prof. Dr. H.M. Rasjidi, mantan Menteri Agama RI dan tokoh Muhammadiyah, pemikirannya terlanjur merasuki kalangan modernis, terutama aktivis muda HMI. Pada perkembangan selanjutnya, corak pemahaman yang lebih substansial terhadap Islam ini semakin mendapat tempat di masyarakat. Ide sekularisasi Cak Nur ini, konon, diilhami oleh Ahmad Wahib, pemikir Muslim yang mati dalam usia muda. Dalam catatan hariannya, Wahib menulis perlunya sekularisasi dan inklusivisasi bagi kaum Muslimin. Dari sini kemudian, Cak Nur menyempurnakan ide-ide Wahib tersebut dalam pemikirannya.

Sepulang dari studinya di Amerika Serikat pada tengah 1980-an, Cak Nur mendirikan Paramadina, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan penerbitan. Kemunculan lembaga ini penting dalam konteks pengembangan Muslim kelas menengah perkotaan. Dengan kata lain, lembaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai lokomotif perubahan bagi kelas menengah perkotaan. Jadi, bila pada awal 1970-an Cak Nur menyediakan landasan filosofis bagi munculnya kelas menengah, maka dengan pendirian Paramadina ia menyediakan landasan teknis operasionalnya.

Intelektual Muslim lainnya yang turut mengembangkan pemahaman yang substansial terhadap Islam adalah Abdurrahman Wahid. Gus Dur, panggilan akrab Wahid, tampil mengemukakan sejumlah ide seperti pribumisasi Islam dan Islam kultural. Pribumisasi Islam adalah Indonesianisasi Islam. Gus Dur memandang bahwa selama ini ada kesalahpahaman yang cukup serius di kalangan masyarakat dengan mengidentikkan Islam dengan Arab, dan Arab dengan Islam. Identifikasi ini tentu saja tidak benar, dan untuk ukuran tertentu sangat menyesatkan. Identifikasi ini selanjutnya mempengaruhi corak keberislaman Indonesia yang, menurut Gus Dur, sangat Arab. Padahal, kata Gus Dur, Islam berbeda dengan Arab, dan Arab berbeda dengan Islam. Karena itu, Islam yang ada di Indonesia harus lebih disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Ia mencontohkan bahwa ucapan “selamat pagi” sama Islamnya dengan “*al-sālamu’alaikum*”.

Demikian pula halnya dengan Islam kultural. Ide Islam kultural Gus Dur merupakan antitesa Islam politik yang pada waktu itu masih merasuki sebagian besar pikiran umat Islam. Islam, menurut Gus Dur, adalah cara hidup, *way of life*, sedangkan politik adalah cara mendapatkan kekuasaan. Bila ia tidak dituluri dengan nilai-nilai agama, politik akan menjadi liar, *power tends to corrupt*, dan lain sebagainya. Karena itu, politik harus didasarkan pada nilai-

nilai agama agar ia tidak menjadi liar. Penularan ini tidak mesti dengan mendirikan partai Islam atau negara Islam, namun lebih menekankan pada pengamalan nilai-nilai agama dalam praktek politik. Dengan kata lain, Islam kultural bukanlah Islam yang anti politik, namun Islam yang menolak adanya simbol-simbol agama dalam politik.

Berbeda dengan Cak Nur yang mendapat basis dukungan dari kalangan modernis, Gus Dur memiliki media yang lebih besar untuk menyemaikan ide-idenya. Gus Dur adalah mantan ketua PBNU untuk dua periode, ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki anggota sekitar tiga puluh juta orang. Pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1992, Gus Dur berhasil membawa NU kembali ke *khittah* tahun 1928 dan menjadi ormas biasa setelah lima puluh tahun lebih malang melintang di panggung politik. *Khittah* NU ini memiliki arti yang sangat strategis bagi perkembangan NU selanjutnya, di mana NU tidak lagi terjebak ke dalam konflik-konflik ideologis-politik. NU sekarang dapat berkonsentrasi lebih baik lagi untuk menjadi *jam'iyah dīniyyah ijtimā'iyah* (organisasi sosial keagamaan).

Dalam konteks Islamisme konservatif, Gus Dur termasuk di antara tokoh Muslim yang bersuara kritis terhadap pendirian ICMI. Ia menyebut pendirian organisasi yang didominasi oleh para teknokrat dan birokrat itu sektarian. Karena itu ia menolak untuk aktif di dalamnya. Bersama aktivis lainnya ia malah mendirikan Fordem (Forum Demokrasi), sebuah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Dalam konteks kelas menengah, Gus Dur pun memiliki sumbangsih yang berarti. Untuk lingkungan NU, ia lah orang pertama yang memperkenalkan wacana pentingnya *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara sehingga negara dapat menjalankan perannya secara lebih konstruktif. Kelas menengah yang mandiri, dalam pandangan Gus Dur, berperan penting dalam percepatan proses demokratisasi di Indonesia, dan itu hanya bisa terjadi bila mereka beroposisi dengan pemerintah. Dari sini pula mengapa, ketika terjadi perdebatan tentang *civil society* antara kelompok modernis dan tradisional, kelompok yang terakhir berpendapat bahwa *civil society* harus mengambil peran oposisi, bukannya komplementer seperti diyakini kelompok modernis, ketika berhadapan dengan kekuasaan pemerintah.

Di samping itu, kegiatan keagamaan yang dimulai dari kampus juga meluas ke masjid di luar kampus seperti Remaja Islam Sunda Kelapa (RISKA) dan remaja masjid Al-Azhar. Kelompok pemuda yang terlibat di sini berasal dari kelompok kelas menengah atas yang umumnya kuliah di perguruan tinggi umum. Salah satu kegiatan nasional pada awal 1990-an adalah kegiatan seni budaya bernuansa Islam dengan tema Gong Remaja dan diadakan di Jakarta. Kegiatan ini muncul sebagai instrumen untuk menjelaskan kepada publik

tentang Islam dan budaya. Hal ini tentu menjadi pertanda bahwa Islam tidak saja dipahami sebagai ajaran yang bersifat ritual saja, tetapi menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Pertemuan Islam kultural di kampung atau tepatnya di kota menjadi titik temu antara Muslim pedesaan-kota dan budaya kapitalis modern. Pengaruh budaya Barat dengan munculnya film Holywood, diskotik, mode pakaian *jeans* dan musik menjadi bagian inheren masyarakat kota. Namun, bagi komunitas Muslim, tradisi Barat dimaknai bukan saja sebagai pengaruh buruk tetapi juga bisa mendatangkan peluang bisnis, sehingga muncullah Muslim kelas menengah yang berhasil dalam bisnis dan politik. Untuk menyebut berberapa contoh kecil dari Muslim kelas menengah menjadi kelompok elite adalah Aburizal Bakri, Fadel Muhammad, Yusuf Kalla dan Arifin Panigoro, pengusaha minyak yang sangat sukses. Budaya kapitalis bagi kelompok Muslim lain juga direspon sebagai ancaman terhadap moralitas kehidupan generasi Islam. Seperti yang akan dijelaskan di bawah nanti, kelompok inilah yang nantinya membentuk sebuah komunitas yang independen dalam wilayah sosial, ekonomi dan keagamaan baik yang berhaluan moderat maupun radikal.

Yang menarik dari catatan Kuntowijoyo, Budayawan Universitas Gajah Mada, bahwa kebangkitan Muslim kelas menengah pasca 1965 sebagai dampak dari perubahan sosial tidak memiliki akar sejarah hierarki masa lalu, seperti halnya budaya Jawa. Kelas ini muncul dengan membawa baju dan corak baru sebagai komunitas kelas menengah baru.<sup>32</sup> Ini bisa dipahami bahwa perubahan ini muncul karena gerakan mengarah tidak lagi pada etnik tetapi lebih pada ideologi atau kesamaan visi. Bagi kelas menengah Muslim, nilai-nilai Islam adalah menjadi pilihan di mana pada saat yang sama modernisasi yang diidentikkan dengan westernisasi (sekularisasi) sebagai tantangan yang perlu dihadapi. Corak Islam, baik yang bersifat simbol dan substansi, dipakai dalam wilayah publik untuk menampilkan identitas keislaman yang dipahami sebagai kesalehan atau ketaatan pada ajaran agama.

Daniel S. Lev melihat bahwa pada masa Orde Baru, umat Islam, walaupun secara kuantitas mayoritas, tetapi secara faktual ia menjadi kelompok minoritas khususnya dalam partisipasi politik.<sup>33</sup> Namun kesadaran keagamaan atau kembali kepada nilai-nilai Islam mulai menguat. Menurutnya, ada dua hal yang cukup berpengaruh. Pertama, kegagalan rezim Orde Baru dalam mengakomodir kelompok Islam sehingga mereka melakukan gerakan yang tidak menjadi perhatian penguasa. Kedua, adanya tantangan global dengan menguatnya

---

<sup>32</sup> Hefner, *Civil Islam*, 124.

<sup>33</sup> Robin Bush, "Redefining Political Islam in Indonesia: Nahdhatul Ulama and Khittah 26," *Studia Islamika*, Vol. 7, No. 2 (2000), 82.

sekularisasi (modernisasi) di segala bidang. Salah satu gerakan untuk merespon fenomena sosial ini, umat Islam menjadikan simbolisme budaya Islam sebagai bagian penting untuk menyadarkan dan memperkuat solidaritas. Jilbab dan ucapan *al-salāmu'alaikum* adalah salah satu fenomena menarik. Pakaian jilbab pada saat ini tidak lagi menjadi pakaian resmi lembaga pendidikan Islam, tetapi telah masuk kampus umum (sekuler) seperti IPB, ITB dan UI. Pada saat bersamaan, ucapan salam (*al-salāmu'alaikum*) telah dibudayakan di kalangan kelas menengah mahasiswa, politisi dan pejabat. Ekspresi kultural keagamaan ini lambat laun dapat memperkuat solidaritas kelompok Muslim. Bahkan pada masa akhir pemerintahan Soeharto (1990-an), ucapan salam telah menjadi budaya dan tidak lagi dianggap sebagai simbol Islam semata.

### **Mobilitas Kelas Menengah Pasca Reformasi**

Pada 1998, Soeharto akhirnya jatuh dari kekuasaannya setelah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun. Ia jatuh karena strategi pembangunan ekonomi yang dilakukannya hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara, sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Ternyata kebijakan ekonomi yang berlandaskan teori 'efek menetes ke bawah' hanya menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ternyata, fundamental kekuatan ekonomi Indonesia yang sering dibanggakan sebelumnya hanyalah mitos belaka. Buktinya, ketika krisis mata uang mendera sejumlah negara di Asia Tenggara, alih-alih bisa mengatasi, Indonesia justru semakin terpuruk ke dalam jurang krisis yang berkepanjangan.

Pasca-Reformasi, semangat untuk menata kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara begitu kuat terasa. Salah satu amanat Reformasi adalah memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk menentukan kebijakannya masing-masing. Sebelumnya pada masa Orde Baru, negara menerapkan kebijakan yang sentralistik. Akibatnya terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Di samping itu, kebijakan ini menghambat mobilitas vertikal masyarakat dan hanya menyuburkan KKN. Pada sisi lain, kebijakan ini juga menampilkan foto-foto buram pembangunan seperti kemiskinan, kerawanan sosial, ketegangan antar kelompok yang setiap saat dapat meledak menjadi konflik terbuka.

Bagi kelompok Muslim, Reformasi merupakan momen yang berharga untuk mengejar ketertinggalan mereka dibanding kelompok non-Muslim. Pada masa Orde Baru, seperti diketahui, kelompok Kristen, Katolik, dan kelompok etnik Cina, karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dibanding kelompok Muslim, pada umumnya dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik dibanding kelompok Muslim. Mereka dapat memasuki perguruan-perguruan tinggi yang bergengsi baik negeri maupun swasta di Tanah Air.

Mereka memasuki fakultas-fakultas tertentu yang memiliki arti strategis di tengah masyarakat, seperti kedokteran, teknik, dan ekonomi. Karena itu kemudian tidak aneh bila profesi-profesi yang strategis dikuasai oleh mereka dan melahirkan apa yang disebut tirani minoritas.

Akan tetapi sejak Reformasi, ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan, peta ketimpangan itu lambat laun mulai berubah. Menurut penuturan M.K. Tadjudin, dokter senior dan mantan Rektor UI, sekarang jumlah dokter Muslim dan non-Muslim hampir sama, dan satu atau dua tahun ke depan, jumlah dokter Muslim dipastikan lebih banyak.<sup>34</sup> Keterangan Tadjudin ini sebenarnya sangat beralasan. Dahulu, dokter adalah profesi yang hanya bisa dicapai oleh priyayi dan anak orang kaya. Ini terus berlanjut sampai zaman kemerdekaan. Pada zaman Orde Baru, sulitnya mencari dosen pribumi baru disadari sehingga timbul kesadaran untuk melakukan pemihakan pada kalangan pribumi (*affirmative action*) yang ingin kuliah di kedokteran. Namun kebijakan ini tidak cukup, mengingat untuk masuk fakultas ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sejak saat itu, fakultas kedokteran didirikan di beberapa fakultas negeri di Tanah Air. Pada saat yang sama, pada periode 1980-an ke atas, berkat kemajuan ekonomi yang dicapai Orde Baru, mulai ada mahasiswa Muslim yang masuk fakultas itu.

Gerakan serupa terjadi juga di bidang-bidang lain seperti hukum, media, pendidikan, dan ekonomi. Generasi muda Muslim yang pada era 1990-an melewati pendidikannya di perguruan tinggi sekarang mulai mengisi bidang-bidang tersebut. Mereka menjadi profesional Muslim, menjadi insinyur, pengacara, wartawan, dan pendidik. Mungkin satu-satunya bidang yang memerlukan waktu lebih lama untuk dikuasai adalah ekonomi. Seperti diketahui, kelompok etnis Cina masih menguasai perekonomian Indonesia. Konon sekitar 75 persen dari ekonomi Indonesia dikuasai mereka. Sisanya yang 25 persen dinikmati pribumi.

## Penutup

Gerakan kelas menengah Muslim telah menjadi penggerak demokratisasi di Indonesia, terutama pasca Reformasi. Di bawah pemerintahan kolonial, gerakan kelas menengah Muslim lebih didorong oleh sentimen keindonesiaan daripada keislaman, karena penindasan kolonial merata bagi semua warga pribumi. Dakwah dan sosial, utamanya pendidikan, adalah basis kekuatan Muslim kelas menengah. Pada masa Orde Baru, gerakan dakwah dan sosial

---

<sup>34</sup>Wawancara pada bulan Januari 2007. Saya ucapkan terima kasih pada saudara Jajang Jahroni yang telah memberikan saran untuk mengutip hasil temuannya.

masih menjadi pilihan utama dari pada politik praktis. Karena pada masa itu kontrol penguasa pada gerakan Islam politik masih kuat. Kelompok tradisional, dibanding kelompok modernis, terutama kiai-kiai konservatif, mendapat kontrol yang sangat ketat dari pemerintah terutama dalam masalah partisipasi politik (Pemilu). Dari sinilah hubungan saling curiga tetap ada hingga pada akhir 1980-an. Baru pada awal tahun 1990-an, hubungan itu mulai membaik ketika Soeharto membutuhkan dukungan dari kalangan Muslim.

Kelahiran ICMI, gerakan Muslim kelas menengah terus menguat dan mengisi posisi-posisi birokrasi dan politik. Kehadiran ICMI dan organisasi masyarakat sipil lainnya menjadi kekuatan-kekuatan penting setelah Reformasi. Dari sinilah interaksi antara kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan Pancasila bertemu dalam ruang publik yang terbuka. Dengan ruang publik yang demokratis ini perbedaan ini berhasil dikomunikasikan dalam kerangka negara demokrasi Pancasila. Karenanya, pertentangan dalam masalah ideologi tentu tidak akan berakhir, tetapi dengan sistem demokrasi akan mampu menghasilkan suara-suara yang mendorong aspirasi masyarakat secara terbuka. Dari situlah keinginan rakyat menjadi bagian penting sebuah negara, tanpa ada paksaan dan tekanan.

#### **Daftar Pustaka**

- Andito, ed. *Menggusur Status Quo*. Bandung: Rosdakarya, 1998.
- Bruinessen, Martin van. *Geneologies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia*. Netherlands: ISIM and Utrecht University, 2003.
- Bruinessen, Martin van. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Bush, Robin. "Redifining Political Islam in Indonesia: Nahdhatul Ulama and Khittah 26," *Studia Islamika*, Vol. 7, No. 2 (2000): 61-86.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hefner, Robert W. *ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi*. Bandung: Mizan, 1995.
- Heryanto, Ariel. "Kelas Menengah Indonesia: Tinjauan Kepustakaan," *Prisma*, No. 4, 1990.
- Hiroshi, Mitsuo. *The Development of Javanese Cotton Industry*. Tokyo: The Institute of Developing Economics, 1970.
- Jaya, Hadi. *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kunio, Yoshihara Kunio. "Ersatz Capitalism in Southeast Asia", makalah pada seminar yang diadakan majalah Warta Ekonomi di Jakarta, 21 Juni 1990.

- Kunio, Yoshihara. "Kapitalisme Semu Asia Tenggara," terjemahan dari *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia*. Jakarta: LP3ES, II/1991.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Larson, Gerorge D. *Masa Menjelang Revolusi*. Terjemahan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990.
- Latif, Yudi. "The Rupture of Young Muslim Inteligensia in the Modernization of Indonesia," *Studia Islamika*, Vol. 12, No. 3 (2005).
- Lev, Daniel S. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Arises over the Banyan Tree*. Yogyakarta: Percetakan UGM, 1983.
- Nieuwenhuijzen. *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia*. The Hague: N. V. Uitgeverij W. Van Hoeve, 1958.
- Nimpoeno, John S. "Mencari Golongan Menengah dan Perilakunya," *Prisma*, No. 2 (Februari, 1984).
- Pijper, G.F. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Diterjemahkan oleh Tujimah dan Yessy Augustin. Jakarta: UI Press, 1985.
- Tanter, Richard & Kenneth Young. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, II/1996.
- Zulkarnain, et al. ed. *Kelas Menengah Digugat*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.